



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERU WIWOHO SUPADI PUTRA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **85625**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 985.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/60 m2 di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/21 m2 di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/66 m2 di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/36 m2 di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 445 m2 di KAB / KOTA PACITAN, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 408.800.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA/B 101 G A/T 03 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 137.050.000



5. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 244.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 127.262.200

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.956.103.332

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.477.165.532

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.477.165.532

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.